



Tunar Hijau Hayati

**IKATAN ALUMNI
KELUARGA PELAJAR MAHASISWA KALIMANTAN TIMUR
(IA - KPMT)**

Mengucapkan :

TERIMA KASIH

Kepada

DR. Yonathan

Atas partisipasinya dalam

SEMINAR NASIONAL KELISTRIKAN

T e m a :

Menyikapi Aspirasi Daerah Dalam Pembangunan Ketenaga Listrikian

*Pada Minggu - Senin, 9 - 10 Juni 2002
Di Hotel Dusit Balikpapan*

TINJAUAN EKONOMIS TERHADAP TARIF DASAR LISTRIK (TDL)

Oleh :

Yonathan Pongtuluran

(Pusat Penelitian Kependudukan Lemlit UNMUL)

A. Pendahuluan

Sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya maka energi listrik bukanlah merupakan barang langka melainkan telah menjadi barang kebutuhan yang cukup penting untuk menopang segala aktivitas masyarakat baik yang bermukim di pedesaan terutama di perkotaan dalam memenuhi kesejahteraannya. Beberapa diantaranya, seperti penerangan dan menggerakkan segala peralatan elektronik dalam rumah tangga serta keperluan lainnya yang sifatnya konsumtif. Sedangkan untuk tujuan produktif adalah untuk menggerakkan mesin industri rumah tangga hingga industri berat, penerangan untuk Toko atau tempat usaha dan sebagainya. Kemudian dengan kemajuan teknologi, akan dapat mendorong manusia dalam mengembangkan keterampilan serta pengetahuannya dibidang-bidang tertentu yang dapat menghasilkan suatu output sehingga pemanfaatan energi listrik tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mendukung segala aktivitas masyarakat. Hingga saat ini kapasitas mesin pembangkit listrik terpasang di Kalimantan Timur khususnya yang dikelola oleh pihak PLN termasuk mesin pembangkit yang baru didatangkan mencapai sekitar 40 KWH. Namun demikian kapasitas terpasang tersebut belum mampu mengimbangi permintaan masyarakat luas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan masih sebagian besar daerah terutama daerah terpencil belum dapat dijangkau jaringan listrik PLN. Demikian pula pembangkit listrik yang dioperasikan KUD dan Captiv power lainnya masih relatif terbatas sehingga sebagian besar daerah terpencil di Kaltim belum mendapatkan penerangan listrik.

Yang menjadi masalah adalah bahwa hingga saat ini khususnya di Kalimantan Timur kapasitas terpasang dari mesin pembangkit listrik yang dikelola PLN belum mampu mengimbangi permintaan masyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan

Bila dibandingkan antara jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 2.436.545 jiwa (Hasil Sensus 2000) dengan kapasitas mesin pembangkit listrik terpasang, maka rata-rata pemakaian perkapita baru mencapai sekitar 300 – 400 KWH /tahun. Pada negara maju seperti Amerika Serikat rata-rata pemakaian sekitar 8.000 KWH / Tahun, Jepang diperkirakan sekitar 6000 – 7000 KWH / tahun yang berarti untuk Kalimantan Timur hanya sekitar 1/30nya dari rata-rata pemakaian perkapita di Amerika Serikat atau 1/25 dari rata-rata pemakaian perkapita di Jepang.

Hal ini disebabkan karena pada negara-negara maju hampir semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya menggunakan energi listrik bahkan sebagian besar diantara mereka digunakan untuk tujuan yang lebih produktif, sementara

***). *Disampaikan dalam rangka sosialisasi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Tingkat I Kalimantan Timur. Tanggal 29 Juli 2003, di Samarinda*

pemakaian energi listrik di Negara kita masih sebagian besar bersifat konsumtif dan hanya sebagian kecil masyarakat memanfaatkannya untuk tujuan produktif.

B. Manfaat dan kegunaan tenaga listrik bagi masyarakat

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka menuntut manusia berusaha untuk mengikutinya agar tidak ketinggalan informasi. Berbagai upaya yang dilakukan manusia dalam memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satu diantaranya adalah pemanfaatan energi listrik untuk menunjang segala aktivitas masyarakat. Energi listrik selain dapat bermanfaat untuk penerangan juga bermanfaat untuk menggerakkan industri rumah tangga, bisnis dan lain-lain.

Sedangkan kegunaannya adalah lebih praktis, efisien, mudah didapatkan sepanjang ada jaringan, mudah diatur pemakaiannya dan dapat digunakan secara terus-menerus sesuai kebutuhan.

C. Fungsi dan potensi tenaga listrik dalam mendorong perkembangan ekonomi

Fungsi utama energi listrik adalah untuk menggerakkan mesin industri (mulai dari industri rumah tangga hingga ke industri berat) dan benda-benda elektronik, memenuhi kebutuhan sosial dan rumah tangga, memperlancar sistem peralatan komunikasi, mendukung sistem pengoperasian komputer, penerangan Kantor, jalan dan sebagainya. Tenaga listrik dapat menopang kebutuhan industri berat dan ringan, industri rumah tangga maupun aktivitas masyarakat lainnya dan sekaligus dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan semakin meningkatnya produktivitas masyarakat berarti terjadi perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan mencakup kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan dalam upaya meningkatkan kemampuan perorangan atau kelompok yang lebih besar dalam meningkatkan penghasilannya. Perkembangan ekonomi mencakup adanya perubahan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi.

Ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Timur yang semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya barang ekspor non migas dari Kalimantan Timur ke berbagai manca negara. Dengan semakin tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat tersebut berarti bahwa kebutuhan masyarakat tentang energi listrik di masa mendatang akan semakin meningkat pula. Kemudian untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan energi listrik tersebut maka pihak pemerintah telah merencanakan dan berupaya mencari sumber daya pembangkit listrik alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan sesuai sumber daya yang tersedia di Kalimantan Timur seperti Gas Alam, Batu Bara, Tenaga Air, Sinar Matahari dan sebagainya.

Sesuai data yang diperoleh bahwa perkiraan potensi energi pembangkit listrik yang tersedia di Provinsi Kalimantan Timur cukup besar dan mampu memenuhi segala kebutuhan daerah ini secara berkelanjutan apabila dikelola secara baik dan profesional. Perkiraan masing-masing sumber energi tersebut antara lain batu bara 5 miliar ton, gas bumi 47,75 trilyun SCF, minyak bumi 1,18 miliar barrel. Sumber energi lainnya seperti Tenaga Air 6.850 MW, PLTS (Tenaga Surya), PLTMH

(micro hidro), dan PLTU biomassa berskala kecil. Khusus untuk sumber energi pembangkit tenaga air (PLTA) di Kalimantan Timur berdasarkan lokasi potensi dan hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal diantaranya, DAS Kayan 2.333,2 MW, DAS Mahakam 1.080,8 MW, DAS Sebakung 430,4 MW, DAS Kelai 340,8 MW, dan DAS lainnya 2.665,6 MW sehingga total keseluruhannya adalah 6.850,8 MW.

Dari potensi sumber daya mineral dan energi tersebut di atas bilamana dikelola secara optimal dan professional, maka akan dapat membantu PLN dalam menggunakan sumber daya alternatif untuk menekan biaya operasional sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah di Kalimantan Timur sehingga TDL yang dikenakan kepada para pelanggan dapat lebih ditekan dan terjangkau hingga ke masyarakat golongan ekonomi lemah. Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan pemanfaatan sumber energi alternatif tersebut adalah untuk mendorong penciptaan dan percepatan industri-industri dasar di pedesaan sebagai acuan sumber input atau mitra kerja bagi industri-industri berskala menengah ke atas yang lebih banyak ber ada di perkotaan.

Kemudian untuk mencapai ke arah tersebut di atas maka diperlukan suatu kajian khusus dan mendalam untuk menetapkan sumber daya alternatif pilihan yang di anggap paling efektif dan efisien sesuai potensi dan karakteristik yang dimiliki daerah ini.

Sebagai gambaran umum mengenai penjualan energi listrik di Kalimantan Timur pada tahun 2000 sebesar 813.952 MWH yang terdiri dari pemakaian Rumah Tangga 146.910 MWH (51,05 %), Komersil 146.910 MWH (18,05 %), Industri 183.943 MWH (22,59 %) dan Publik 67.560 MWH (8,30 %). Tahun 2001 sebesar 882.496 MWH yang terdiri dari pemakaian Rumah Tangga 449.999 MWH (50,99 %), Komersil 157.551 MWH (17,85 %), Industri 69.838 MWH (7,91 %) dan Publik 205.108 MWH (23,24 %). Tahun 2002 sebesar 1.007.026 MWH yang terdiri dari pemakaian Rumah Tangga 492.366 MWH (48,89 %), Komersil 170.686 MWH (16,95 %), Industri 71.272 MWH (7,08 %) dan Publik 272.702 MWH (27,08 %).

Sedangkan untuk tahun 2003 jumlah energi listrik yang terjual kepada masyarakat diperkirakan sebesar 1.071.442 MWH yang terdiri dari pemakaian Rumah Tangga 540.053 MWH (50,40 %), Komersil 185.861 MWH (17,35 %), Industri 72.826 MWH (6,80 %) dan Publik 272.702 MWH (25,45 %).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa konsumen energi listrik sejak tahun 2000-2003 lebih dari 50 % penjualan energi listrik tersebut berasal dari konsumen Rumah Tangga. Sedangkan yang paling terendah adalah konsumen pihak Industri terutama yang berskala menengah ke atas. Rendahnya penggunaan tenaga listrik PLN pada Industri disebabkan karena pada umumnya Industri berskala menengah ke atas mempunyai mesin pembangkit listrik sendiri sehingga penggunaan listrik dari PLN hanya digunakan untuk keperluan tertentu di luar proses produksi seperti untuk keperluan Kantor, gudang dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi sewaktu-waktu terjadi pemadaman Listrik PLN sehingga dapat mengganggu proses produksi.

D. Prinsip-prinsip ekonomi dalam perusahaan listrik

Ditinjau dari prinsip ekonomi klasik menyatakan bahwa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi moderen menyatakan bahwa dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu. Artinya bila pengorbanan kecil hasil yang diperolehpun kecil, sebaliknya

dengan pengorbanan yang besar akan mendapatkan hasil yang besar pula dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah atau dianggap tetap.

Apa pula pepatah mengatakan bahwa memancing dengan menggunakan kail kecil akan menghasilkan ikan kecil dan memancing dengan menggunakan kail besar akan menghasilkan ikan besar. Keduanya tidak dapat dihindari karena tergantung dari permodalan, kemampuan, selera manusia dan lain-lain.

Dikaitkan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) berarti tidaklah semata-mata mengejar konsumen (Industri) yang dikenakan tarif lebih tinggi melainkan juga pada konsumen yang berasal dari organisasi sosial, penerangan jalan dan kebutuhan rumah tangga dengan pengenaan tarif lebih rendah. Bagi perusahaan menengah ke atas biasanya memiliki mesin pembangkit listrik sendiri atau mesin cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan kemacetan listrik PLN dan untuk kepentingan perusahaan lainnya sehingga hal tersebut dapat dikategorikan konsumen langkaha. Sebaliknya untuk konsumen yang berasal dari rumah tangga yang selama ini sebagai konsumen tertinggi yakni lebih dari 50 %, maka hubungan baik perlu ditingkatkan, dipelihara dan diberikan pelayanan yang maksimal. PLN sebagai pihak produsen energi listrik dan pelanggan yang berasal dari berbagai elemen masyarakat sebagai konsumen tentu saja akan terjadi hubungan kesaling tergantungan dan saling menguntungkan.

E. Komponen-komponen biaya tenaga listrik

Hingga saat ini komponen-komponen kelistrikan nasional masih merupakan barang impor sehingga dalam penambahan sebuah mesin pembangkit listrik terutama yang berskala besar maupun jaringannya diperlukan dana investasi yang cukup besar. Sistem pembayarannya didasarkan pada surat perjanjian yang telah disepakati dengan cara dicicil dan dinyatakan dalam nilai Dollar Amerika (US \$). Kemudian untuk menutupi besarnya cicilan tersebut maka pemerintah telah menetapkan TDL sebesar US \$ 0,7 per Kwh kepada setiap pelanggan. Bila terjadi perubahan Kurs Dollar Amerika (US \$) kedalam nilai rupiah dan ternyata harga TDL tersebut jauh melampaui jumlah pembayaran dari seluruh pelanggan maka selebihnya merupakan tanggungan pemerintah. Selama ini berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan TDL sesuai pemanfaatannya yang diharapkan akan terjadi suatu subsidi silang atau saling menutupi antara kegiatan masyarakat yang dikenakan tariff lebih tinggi dan TDL rumah tangga yang dikenakan tariff rendah namun kelihatannya belum mampu mencapai titik impas sehingga pemerintah harus mengeluarkan dana subsidi untuk mengimbangi biaya operasional dan pembayaran cicilan komponen listrik yang diimpor sebesar kurang lebih 4 tryliun per tahun. Hal ini mulai terjadi sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi yakni 1997/1998 hingga saat ini. Kemudian salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi dana subsidi tersebut adalah dengan menaikkan TDL secara proporsional. Hal lain yang dapat ditempuh pemerintah dalam mengurangi dana subsidi terhadap energi listrik adalah efisiensi dalam penggunaan biaya operasional PLN.

F. Analisis Ekonomi terhadap Tarif Dasar Listrik 2003

Secara umum dapat dikatakan bahwa energi listrik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Istilah pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output di dalam masyarakat terutama yang mempunyai usaha maupun keterampilan yang menghasilkan suatu produk secara terus menerus

sebagaimana diukur dengan produk nasional bruto (PNB) atau lebih sempit lagi produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai seluruh keluaran (barang dan jasa) yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu. PDRB mencerminkan nilai keseluruhan produksi yang dihasilkan suatu daerah tertentu. Pertumbuhan PDRB mempunyai beberapa ciri, antara lain peningkatan terus-menerus jumlah barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah, terutama barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan langsung manusia.

Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh kemajuan teknologi dalam produksi dan secara terus menerus bertambah maju bersamaan dengan peningkatan kekayaan kapital (barang modal) yakni pertambahan terus menerus jumlah mesin, perlengkapan dan perbaikan mutu kekayaan kapital. Akibatnya, semua faktor produksi (Kapital, Lahan dan Mesin) memperlihatkan peningkatan keluaran per satuan masukan yang digunakan. Ini berarti produktivitas naik, yang pada gilirannya dapat mendorong kenaikan pendapatan.

Secara ekonomi bahwa bagi suatu negara bahkan suatu daerah yang berpendapatan rendah (termasuk penduduk Kaltim), perkembangan ekonomi bermakna lebih luas dari pada sekedar pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan ekonomi sikap dan kelembagaan perlu diubah. Tercapainya pertumbuhan ekonomi mungkin merupakan pertanda terjadinya beberapa perubahan dalam struktur ekonomi, tetapi perkembangan mengandung makna yang lebih luas. Dalam perkembangan tercakup kesiap sediaan masyarakat menerima perubahan dan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan yang lebih baik, dan meningkatnya usaha untuk menciptakan kemampuan perorangan yang lebih besar agar warga masyarakat dapat memperbaiki nasib mereka sendiri.

Jadi perkembangan memerlukan pertumbuhan. Pertumbuhan meningkatkan kemampuan menikmati hasil kemajuan materiil. Pertumbuhan disertai perubahan berbagai lembaga suatu negara atau daerah dan juga membuka jalan bagi perubahan yang diperlukan pada lembaga-lembaga tersebut. Dengan adanya perubahan lembaga-lembaga tersebut akan berpengaruh terhadap terjadinya perkembangan.

Dari dua konsep tersebut di atas, mungkin lebih bermanfaat sekiranya dipahami konsep dan proses ekonomi yang relevan tentang bagaimana orang-perorangan dan masyarakat mampu mengatasi masalah ekonomi mereka yang terpenting.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan pemanfaatan energi kelistrikan oleh masyarakat luas, yang pada saat ini jaringan distribusinya telah menjangkau ke desa-desa walaupun sifatnya masih terbatas. Keterbatasan distribusi energi listrik hingga ke desa-desa utamanya daerah yang sangat terpencil disebabkan karena selair jumlah penduduknya sedikit dan penyebaran penduduk tidak merata serta saling berjauhan satu sama lainnya, juga disebabkan karena keterbatasan modal yang dimiliki pemerintah untuk pembelian mesin pembangkit yang hingga saat ini masih diimpor dari negara lain. Pembelian sebuah mesin pembangkit berskala besar yang selama ini dilakukan pemerintah masih tergantung dari pinjaman Luar Negeri yang dinyatakan dalam kurs US Dollar (US \$) sehingga angsuran pembarannya pun harus dilakukan dalam satuan US Dollar pula. Semakin tinggi perubahan dalam kurs US Dollar terhadap rupiah, maka jumlah angsuran yang akan dibayar pemerintah dalam satuan rupiah akan semakin tinggi pula sekalipun jumlah dalam satuan US Dollar tidak berubah. Untuk mengimbangi biaya modal tersebut maka TDL yang dibebankan kepada konsumen listrik, terlebih dahulu dihitung dalam US Dollar per Kw

kemudian di Kurskan dalam nilai rupiah baru ditemukan TDI dalam satuan rupiah.

Untuk meringankan beban masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah (Golongan Ekonomi Lemah) maka ada kebijakan pemerintah seperti yang di atur dalam Undang-undang No. 20 tahun 1999 dengan membedakan TDL untuk keperluan Industri, kegiatan bisnis, lembaga pemerintah, organisasi sosial dan kebutuhan Rumah Tangga sesuai dengan kapasitas pemakaian. Khusus untuk organisasi sosial seperti Rumah Ibadah, Panti Asuhan, dan listrik Rumah Tangga 450 wat karena sifatnya hanya konsumtif serta menyangkut kepentingan orang banyak sehingga TDL dikenakan lebih rendah dibandingkan dengan yang dibebankan pada Industri atau kegiatan bisnis yang sifatnya produktif. Harga yang diterima oleh Pihak PLN atas penjualan energi listrik tersebut dari pihak pelanggan (konsumen) ditetapkan rata-rata sebesar US \$ 0,7 /Kw, namun yang membedakan adalah bahwa untuk keperluan industri tidak disubsidi pemerintah sedangkan untuk kegiatan sosial (menyangkut kepentingan orang banyak) dan kebutuhan RT menengah ke bawah masih sebagian besar disubsidi pemerintah.

Yang menjadi masalah bahwa hingga saat ini masih lebih dari 50 % pelanggan energi listrik PLN berasal dari pelanggan Rumah Tangga yang disubsidi pemerintah sehingga tingkat keekonomian yang dicapai PLN belum optimal. Bila kurs US \$ tetap stabil terhadap nilai rupiah maka pihak PLN hanya mampu mencapai tingkat pulang pokok (Break Even Point) atau walaupun untung relatif kecil, tetapi manakalah nilai US \$ menguat terhadap rupiah sedangkan pengenaan tarif terhadap para pelanggan dalam bentuk rupiah tidak mengalami perubahan (tetap) berarti sudah dapat dipastikan bahwa kerugian besar akan dialami pihak PLN. Saat ini kurs US \$ terhadap rupiah adalah US \$ 1,- = Rp. 8.500,-. Berikut ini suatu contoh sederhana perhitungan penghasilan PLN bila kurs US \$ terhadap rupiah stabil atau tidak berubah sebagai berikut ;

Harga Pokok energi listrik adalah sebesar US \$. 0,7/kWh atau dalam nilai rupiah $0,7 \times \text{Rp. } 8.500, = \text{Rp. } 5.950,- / \text{kWh}$. Tarif beban yang dikenakan kepada konsumen untuk daya 450 VA adalah Rp. 8.000,- (yang berlaku hingga 31 Maret 2003) yang berarti bahwa besarnya laba kotor yang dapat diperoleh PLN sebelum dikurangi biaya administrasi, biaya penjualan, bunga dan pajak adalah sebesar $\text{Rp. } 8.500 - (0,7 \times \text{Rp. } 8.500,-) = \text{Rp. } 2.550,- / \text{kWh}$. Bila total biaya administrasi dan umum + biaya penjualan + bunga + pajak diasumsikan sebesar Rp. 2.000 maka besarnya keuntungan yang dapat diperoleh PLN adalah sebesar $\text{Rp. } 2.550,- - \text{Rp. } 2.000,- = \text{Rp. } 550,-/\text{kWh}$ khusus untuk pemasangan 450 VA. Demikian pula untuk perhitungan dengan kapasitas terpasang 900 VA ke atas dapat disesuaikan seperti tarif yang berlaku.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keekonomian kelistrikan dalam rangka pengenaan TDL terhadap masyarakat model analisis yang digunakan salah satu diantaranya adalah analisis Break Even Point (BEP). Model ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat dimana PLN tidak mendapatkan untung dan rugi. Dari angka ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan TDL setelah memperhatikan perkembangan ekonomi seperti Pertumbuhan ekonomi, PDRB dan lain-lain.

Model lain yang dapat digunakan bagi pihak investor di bidang pembangkit listrik adalah menggunakan analisis criteria investasi seperti model NPV, PI dan IRR dan lain-lain.

Model ini digunakan untuk mengetahui layak tidaknya suatu proyek dilaksanakan seperti bila masyarakat meminta ke pihak PLN agar membangun

PLTA atau jenis lainnya sesuai potensi yang ada di Kalimantan Timur, dan setelah di analisis dengan membandingkan beberapa jenis analisis serta faktor-faktor lainnya dan ternyata dapat menguntungkan maka keputusan untuk membangun PLTA sebagai sumber energi pembangkit alternatif kemungkinan dapat dilaksanakan.

G. Keterbatasan kemampuan pemerintah memberikan subsidi listrik terarah

Hingga saat ini sumber pendapatan negara masih sekitar 90 % berasal dari sub-sektor perpajakan yang dalam hal ini berasal dari rakyat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak sesuai penghasilan yang diterimanya berarti semakin besar pula pendapatan negara yang pada gilirannya dapat meningkatkan APBN. Bila APBN meningkat berarti pemerintah dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sesuai tuntutan rakyat. Namun bila usaha masyarakat menurun berarti akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, kurangnya pasokan pajak ke pemerintah yang pada gilirannya dapat menurunkan penerimaan negara yang berasal dari sub-sektor perpajakan.

Kemudian dengan keterbatasan sumber penerimaan negara tersebut berarti alokasi APBN untuk membiayai pembangunan secara menyeluruh akan semakin terbatas pula termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi energi listrik untuk meringankan beban terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

H. Pengurangan subsidi listrik secara bertahap terhadap pelanggan 450VA

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang diprogramkan pemerintah secara bertahap yakni per triwulan atau dilakukan 4 kali selama tahun 2003 tidak lain dimaksudkan untuk mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah selama ini terhadap energi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) dianggap tidak efektif karena justru lebih banyak dinikmati oleh pihak pengusaha dan Golongan masyarakat menengah ke atas bila dibandingkan dengan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (Golongan ekonomi lemah). Juga perlu dipahami bahwa pemberian subsidi terhadap energi listrik dan BBM yang dilakukan pemerintah disamping menyulitkan pemerintah dalam melakukan alokasi anggaran juga dapat menimbulkan KKN baru pada kalangan-kalangan tertentu. Selain itu akan dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif, efisien atau melakukan penghematan dalam pemanfaatan energi listrik. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah penggunaan lampu yang hemat energi namun tahan lama, mematikan listrik bila tidak dimanfaatkan, dan lain-lain.

I. Prinsip pemberian subsidi merupakan beban pemerintah.

Sebagaimana halnya dengan BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) selama ini pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan cara pemberian subsidi terhadap TDL. Jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi energi listrik sekitar Rp. 4 triliun per tahun. Pelanggan yang menjadi prioritas utama mendapatkan subsidi dari pemerintah selama ini adalah yang menyangkut kepentingan sosial untuk orang banyak seperti Yayasan

Sosial (Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Tahanan, Rumah Sakit, Rumah Ibadah, Lampu Jalanan dan lain-lain). Sedangkan pemberian subsidi kepada pelanggan Rumah Tangga untuk pemasangan 450 VA dimaksudkan untuk meringankan beban bagi masyarakat golongan ekonomi lemah karena pemanfaatan energi listrik bagi mereka masih bersifat konsumtif sementara sumber pendapatan mereka terbatas. Sebelum krisis moneter pihak PLN masih mendapatkan untung dari hasil penjualan energi listrik sekalipun ada subsidi. Namun setelah terjadi krisis moneter yang mengakibatkan nilai rupiah merosot tajam akhirnya pihak PLN banyak mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena pembelian mesin pembangkit tenaga listrik dan peralatan pendukung lainnya masih merupakan barang impor yang dinilai dalam satuan Dollar.

Kemudian untuk mengantisipasi semakin membengkaknya kerugian yang dialami pihak PLN maka TDL dinyatakan dalam US Dollar. Bila Kurs Dollar menguat terhadap nilai rupiah berarti jumlah rupiah yang harus dikeluarkan oleh pihak PLN cukup besar, sementara TDL yang dibebankan kepada pelanggan tidak berubah. Jadi selisih kurang antara jumlah pembayaran dari pelanggan dengan jumlah pemanfaatan energi listrik dikalikan penetapan TDL sebesar US \$ 0,7 / kw merupakan jumlah yang harus dibebankan kepada pemerintah.

Dengan demikian untuk mengurangi beban pemerintah di bidang pemanfaatan energi kelistrikan maka pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan TDL secara bertahap atau per Triwulan atau selama 4 kali selama tahun 2003.

J. Kesimpulan

Energi listrik merupakan sarana penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat maupun pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) per triwulan selama tahun 2003 dimaksudkan untuk mengurangi beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah setiap tahunnya.

Pemberian subsidi yang dilakukan pemerintah selama ini terhadap TDL maupun BBM tidak efektif karena justru lebih banyak dinikmati pihak pengusaha dan golongan masyarakat menengah ke atas dibandingkan golongan ekonomi lemah, dan selain itu dapat menimbulkan KKN baru yang pada gilirannya dapat merugikan pemerintah.

Untuk meringankan beban pembayaran listrik terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah maka pemerintah telah mengambil kebijakan dengan pemberian TDL lebih rendah untuk pemasangan 450 VA. Penggunaan energi listrik dengan cara selektif sesuai kebutuhan merupakan salah satu cara penghematan energi listrik secara efektif dan efisien.